

LHP APBD Kalbar 2011

Opini WTP Terganjil Aset

Pontianak, BERKAT.

Laporan Hasil Pemeriksaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Barat tahun 2011 oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan provinsi itu diberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) karena kembali terganjal permasalahan aset.

Menurut Anggota VI BPK RI, Rizal Djalil, jika permasalahan aset bisa selesai, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK bisa dicapai.

"Sayang seribu sayang, persoalan aset ini sangat mengganggu dan opini WTP belum dapat direalisasikan," katanya pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD mengenai Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Pelaksanaan APBD Kalbar tahun anggaran 2011 di

Balairung Sari, Gedung DPRD Kalbar, Kamis (5/7).

Rizal Djalil mengatakan, persoalan aset pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK masih menjadi yang paling menojol.

Ia mengatakan, masih banyak persoalan aset yang belum diselesaikan, diantaranya aset tetap, jalan dan jaringan irigasi senilai Rp380 miliar yang belum ditatakelolakan dengan sistem pembukuan yang benar.

"Di Kalbar jalan dan irigasinya dibangun, hanya belum dibukukan, sesuai dengan sistem akuntansi yang benar," kata Rizal Djalil.

Selain itu, lanjut Rizal Djalil, ada aset tanah senilai Rp92,9 miliar yang belum selesai penatalaksanaannya, aset tetap peralatan mesin senilai Rp2,8 miliar. Kemudian ada aset tanah yang belum

bersertifikat senilai Rp53 miliar lebih.

"Kami minta Sekda dan semua jajaran SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang terkait penyelesaian aset, termasuk Dinas PU (Pekerjaan Umum) dan BPN (Badan Pertanahan Negara) untuk segera membuat action plan, memperbaiki tata laksanaanya," katanya.

Rizal Djalil juga meminta agar Pemerintah Daerah untuk tidak memperlambat penyelesaian aset.

Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH, merasa sangat kesal, karena permasalahan aset ini tidak terlalu sulit, tinggal mencatat saja. "Setelah ini saya akan memberikan pengarahan kepada kepala SKPD di Pendopo Gubernur," kesalnya.

Menurut Cornelis, apa yang disampaikan oleh BPK RI Perwakilan Kalbar

harus segera ditindaklanjuti. "Ini merupakan sinyal perintah kerja. Sudah jelas, tinggal kita laksanakan saja," tegasnya.

Ia juga akan mengevaluasi SKPD yang tidak menyelesaikan perintah dari BPK tersebut.

"Mau tidak mau lah, karena ini ada batas waktunya," kesal orang nomor satu di Kalbar ini.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kalbar, Drs. Muhammad Zeet Hamdy Assovie, menambahkan, dirinya akan segera mengkoordinasikan hasil pemeriksaan tersebut kepada SKPD-SKPD yang belum tuntas menyelesaikan administrasinya. "Ini sesuai dengan perintah BPK," katanya.

M. Zeet mengatakan, jika ada penyegaran dari Gubernur terkait lambatnya penyelesaian masalah aset, hal tersebut merupakan hak prerogatif Gubernur dan sesuai dengan kapasitasnya.

"Saya siap melaksanakan hasil rekomendasi beliau (Gubernur, red)," kata mantan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Kalbar ini. (nia)